



## RELEVANSI AJARAN PAUS FRANSISKUS TENTANG KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN

Rolin Ferdilianto Sandelgus Taneo<sup>1</sup>, Verin Jasmin Sonlay<sup>2</sup>

Mahasiswa Program Magister Filsafat UGM<sup>1</sup>, Gereja Masehi Injili di Timor<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[rolintaneo0402@gmail.com](mailto:rolintaneo0402@gmail.com)

**Abstract:** In principle, this article aims to examine the nature of politics according to Pope Francis' teachings. This study helps us to clearly understand the essence of politics, which is inherently linked to issues of welfare. Who should be involved in this type of politics? Of course, we can mention the government and society. Both parties have distinct roles. The presence of leaders should ideally contribute to the birth of social justice in shared life, while society acts as a watchdog to ensure the government's performance is running smoothly. From this thesis, we attempt to explain the problems of democracy in Indonesia, which sometimes remain far from ideal. This paper will then offer solutions to the chaotic Indonesian politics using Pope Francis' perspective on the ideal type of leader and the duties a leader should perform. To structure the explanation of Pope Francis' ideas within the Indonesian political context, we employed a literature review method to complete this paper. We believe that if the ideas of the politics of love, humanity, and friendship are implemented, a clean and honest democratic climate in Indonesia can be realized.

**Keywords:** Indonesia, leader, Pope Francis, politics

**Abstrak:** Secara prinsipil, artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji hakikat dari politik menurut ajaran Paus Fransiskus. Kajian ini membantu kita untuk kemudian melihat secara jernih esensi politik yang memang melekat dengan isu kesejahteraan. Siapa yang kemudian harus terlibat dalam politik macam ini? Tentu saja kita bisa menyebut pemerintah dan juga masyarakat. Kedua belah pihak punya tugas yang berbeda. Kehadiran dari pemimpin itu idealnya bisa memberikan kontribusi pada lahirnya keadilan sosial dalam hidup bersama sedangkan masyarakat hadir sebagai pengawas untuk memastikan bahwa kinerja pemerintah berjalan baik. Dari tesis ini, maka kemudian kami mencoba untuk menguraikan permasalahan demokrasi di Indonesia yang kadang masih jauh dari harapan. Setelah itu, tulisan ini akan memberikan solusi atas carut-marut politik Indonesia dengan menggunakan perspektif Paus Fransiskus tentang tipe pemimpin ideal dan apa tugas-tugas yang harus dilakukan seorang pemimpin. Agar terstruktur menguraikan gagasan Paus Fransiskus ini dengan konteks politik Indonesia maka kami menggunakan metode studi pustaka untuk penyelesaian naskah ini. Kami melihat bahwa jika gagasan tentang politik kasih, kemanusiaan dan persahabatan ini diterapkan, maka iklim demokrasi di Indonesia yang bersih dan jujur bisa direalisasikan.

**Kata Kunci:** Indonesia, Paus Fransiskus, politik, pemimpin

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 2024 yang lalu seluruh masyarakat Indonesia yang telah memenuhi kriteria memilih para pemimpin di negara ini telah melaksanakan tanggungjawab demokrasinya. Pemilihan Umum telah selesai dilaksanakan. Perhelatan pemilu berlangsung pada Februari dan berakhir di bulan November 2024. Masyarakat Indonesia telah memilih pemimpinnya, baik itu di aras nasional dan juga di aras daerah. Di aras nasional, telah terpilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif. Anggota legislatif baik di tingkat daerah hingga pusat telah dilantik sedangkan untuk presiden dan wakil presiden baru sudah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024.

Begitu juga dengan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di aras provinsi dan kabupaten/kota juga telah selesai dilaksanakan. Pelantikan bagi para calon terpilih juga sudah dilaksanakan pada Februari 2025. Mereka yang terpilih ini adalah pemimpin. Bagi kami, hadirnya pemimpin dalam suatu negara berdaulat merupakan salah satu penanda bahwa iklim demokrasi dalam negara tersebut berjalan baik. Memang pemimpin amat dibutuhkan suatu negara guna menjaga stabilitas kehidupan bersama.

Kendati demikian, jika mau jujur untuk melakukan napak tilas perjalanan politik Indonesia di tahun 2024, kita akan menjumpai suatu fakta pahit (menyelewengkan aturan demi mempertahankan kekuasaan yang nanti akan disinggung lebih banyak di bagian bawah) dalam catatan demokrasi Indonesia oleh karena para pemimpin kita terjebak dalam politik oligarki. Analisis dari Ghiyats Wibowo, dkk memperlihatkan tiga bentuk oligarki yang muncul, yaitu: (1). Adanya hubungan antara elit politik dengan kaum pemilik modal. (2). Imbas dari dukungan elit ekonomi yakni mematahkan ketegasan hukum para pejabat terhadap mereka. (3). Adanya kepentingan lain dalam kontestasi politik. Akibatnya terjadi konflik kepentingan.<sup>1</sup>

Untuk bisa menunjukkan bentuk kepemimpinan oligarki ini, khususnya pada bentuk yang ketiga, maka contoh kasus yang bisa dilihat ialah keputusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat usia bagi calon wakil presiden. Putusan ini dianggap sebagai suatu keputusan yang sarat dengan muatan kepentingan. Adapun pokok perdebatan terkait keputusan MK itu yakni pada putusan MK Nomor: 90/PUUXXI/2023. Putusan ini memberi ruang yang lebih luas dalam hal batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Jika dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, usia paling rendah seorang calon presiden dan wakil presiden yakni 40 tahun maka dalam putusan MK Nomor: 90/PUUXXI/2023 ditegaskan bahwa seorang calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau

---

<sup>1</sup> Ghiyats A Wibowo, dkk, "Pembatasan Oligarki Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024): 234.

setidaknya calon bersangkutan sudah pernah atau sementara menduduki jabatan sebagai kepala daerah hasil pemilihan umum.<sup>2</sup>

Keputusan ini kemudian menuai kontroversi. Gelombang demonstrasi muncul sebagai upaya menolak putusan tersebut. Bahkan, ada massa yang menghendaki agar pasangan capres-cawapres tertentu dianulir oleh KPU karena dianggap cacat moral dan politik. Contoh lain lagi tentang ketimpangan dinamika politik Indonesia yakni upaya DPR RI lewat Badan Legislatif (Baleg) yang hendak menganulir putusan MK terkait pemilihan kepala daerah. Adapun putusan MK yang ditolak oleh Baleg DPR ialah putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan pasangan calon di pemilihan kepala daerah.<sup>3</sup>

Dinamika politik Indonesia di tumpuk kepemimpinan sejatinya memperlihatkan juga bahwa politik kerap bersinggungan dengan kepentingan. Maka, kepentingan adalah bagian integral dari politik itu sendiri, yang dalam kasus-kasus tertentu bisa menggunakan identitas, baik agama maupun suku dan kepentingan kelompok dalam meraup untung. Ini menjadi soal besar dalam diri politik itu sendiri.<sup>4</sup>

Masing-masing pemimpin memiliki visinya sendiri ketika menjabat tetapi visi itu bisa dibutakan karena kepentingan lain yang diselundupkan. Tentu situasi ini sungguh miris. Dari realitas ini maka tujuan dari penulisan naskah ini yakni untuk menjembatani pokok ajaran Paus Fransiskus tentang hakikat sesungguhnya dari politik kepemimpinan, dan signifikansinya pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Bisa dibilang bahwa model kepemimpinan ini menjadi solusi konkret dibalik kompleksitas masalah politik Indonesia yang kerap kali para menjerumuskan para pemimpin pada praktik kepentingan diri, kelompok dan menormalisasikan korupsi.

Kami mendasarkan ajaran Paus Fransiskus tentang politik dan kepemimpinan pada dua sumber literatur yakni Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial (*Fratelli Tutti*) serta pokok ajarannya yang berjudul *Pelayanan Kepemimpinan dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*. Dua literatur ini dalam pengamatan kami cukup memuat ajaran Paus Fransiskus tentang kepemimpinan dan politik. Tujuan akhir dari penulisan artikel ini ialah mencari titik hubung ajaran Paus Fransiskus dalam konteks Indonesia dan juga sebagai catatan dari masyarakat pinggiran akan konstelasi politik yang lebih baik.

---

<sup>2</sup> Saqinah Aifi Kirmala, dkk, "Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023," *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 493.

<sup>3</sup> Juli Hantoro, *DPR Tolak Putusan MK Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah*, Oktober 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1906618/dpr-tolak-putusan-mk-tentang-syarat-usia-calon-kepala-daerah>.

<sup>4</sup> Rolin F. S. Taneo, *Politik Identitas Di Indonesia Dan Wacana Perdamaian*, No. 09-10, Tahun ke-73 (Majalah Basis, 2024), 51.

Dari dua literatur utama yang kami rujuk, yang secara spesifik membahas ajaran Paus Fransiskus tentang politik dan kepemimpinan, maka kami mendapatkan sebuah kesan bahwa ajaran Paus Fransiskus ini sifatnya sangat humanis, yang teraktualisasi melalui kehadiran seorang pemimpin yang sudah semestinya menciptakan keadilan dan berbagai kebijakan yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Jalan ini yang harusnya bisa dilihat sebagai alternatif lain dalam membangun sistem politik yang humanis, yang bisa juga dicontohi oleh para pemimpin negara dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya secara baik. Tulisan ini juga akan melengkapi model oligarki yang dikemukakan oleh Ghiyats Wibowo dan juga Saqinah Aifi Kirmala, dkk yang menunjukkan adanya penyelewengan kekuasaan dan aturan oleh pemimpin di negeri ini.

## 2. Metode Penelitian

Adapun metode yang kami pakai dalam uraian naskah ini ialah metode studi pustaka. Metode ini secara sederhana bisa dipahami sebagai cara menyelesaikan suatu tulisan dengan melakukan penelusuran terhadap referensi bacaan yang relevan dengan topik yang ditulis. Di samping itu, melalui studi pustaka, seorang pemikir diajak untuk berdialog dengan berbagai literatur yang ada sebagai dasar pijak bagi kami untuk mengembangkan teori penulisan artikel.<sup>5</sup> Dalam hal ini, dua dokumen ajaran Paus Fransiskus yang membahas ajaran kepemimpinan dikutip dan didialogkan dengan referensi lain yang juga membahas tentang politik dan kepemimpinan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Konsep politik tanpa kuasa sering dianggap utopis, terutama dalam realitas politik Indonesia yang sarat kepentingan. Namun, jika kita menelusuri akar katanya, polis dalam pemikiran Aristoteles justru menekankan pada kesejahteraan bersama melalui kolaborasi, bukan dominasi kuasa.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, maka bagi kami, ajaran Paus Fransiskus tentang “politik kasih” menawarkan perspektif segar: politik seharusnya bukan arena perebutan kekuasaan, melainkan ruang pelayanan untuk mencapai keadilan sosial. Pertanyaannya, mungkinkah politik semacam ini diwujudkan dalam sistem Indonesia yang masih terjebak oligarki dan politik transaksional?”.

Siapa yang dapat mengatur seluruh perangkat dalam polis? Sudah barang tentu pengaturan itu dapat berlangsung apabila ada pemerintah. Maka, kami berkesimpulan bahwa pemerintah sesungguhnya adalah representasi dari masyarakat umum, tetapi diberikan suatu mandat khusus untuk bekerja dengan optimal memanusiakan manusia dalam komunitas bersama. Hal ini berarti bahwa pemimpin harus bekerja atas kepentingan bersama, bukan kepentingan individu.

---

<sup>5</sup> Magdalena, dkk, *Metode Penelitian* (Penerbit Buku Literasiologi, 2021), 74.

<sup>6</sup>Bagus Takwin, *Etika Politik: Menimbang Ulang Politik*, (Jakarta Pusat: www.srimulyani.net, 2011), vii-viii.

Yang menarik dalam catatan Yosef Koten tentang politik, yang ia secara panjang-lebar uraikan dalam bukunya yang berjudul *Partisipasi Politik*, ialah bahwa ia menyandingkan makna *polis* dan *koinonia* dalam satu garis lurus. *Polis* itu adalah kota atau negara. Dalam *polis* ada komunitas (*koinonia*). *Koinonia* atau komunitas masyarakat itu ada dan dibangun atas dasar kebaikan untuk mencapai kesejahteraan.<sup>7</sup> Guna mencapai kesejahteraan dalam komunitas maka dua hal perlu diperhatikan menurut Koten.

**Pertama**, dalam komunitas perlu menghidupkan spirit persahabatan. Persahabatan dalam pengertian ini yakni suatu upaya bersama untuk bekerja sama.<sup>8</sup> Tetapi, dalam konteks pelayanan kepada masyarakat di ruang publik, makna persahabatan harus diperluas, tidak hanya soal kerja sama, sebab koalisi para pejabat bisa saja mencederai kembali pelayanan publik karena berpihak kepada kepentingan kelompok. Maka menarik untuk melihat tawaran Joas Adiprasetya tentang persahabatan di ruang publik, yakni menyadari kehadiran sesama, membangun relasi dengan mereka, serta melayani sesama sebagai bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin.<sup>9</sup> Pemimpin yang baik harus menyadari tanda-tanda ini agar bisa menjalankan pelayan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.

Yang **kedua**, hendaknya dalam komunitas juga ada semangat keadilan. Keadilan ini berarti pemerataan distribusi terhadap semua anggota dalam *polis* berdasarkan kontribusi yang telah mereka lakukan. Dengan menghidupi dua poin ini, maka harapan untuk tercipta keadilan sosial bisa diaktualisasikan.<sup>10</sup> Hanya saja dalam proses menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, kerap kali yang bersangkutan dibutakan matanya karena hasrat mencapai kepentingan pribadi. Kami kemudian tertarik untuk sedikit menyinggung etika kuasa yang Friedrich Nietzsche gemakan. Franz Magnis Suseno menjelaskan paham kehendak untuk berkuasa yang disampaikan Nietzsche sebagai tujuan dari kehidupan seseorang. Dimana ada kehidupan, dari sana akan lahir atau timbul keinginan seseorang untuk menjadi besar, menjadi kuat bahkan berkuasa. Untuk tiba pada tingkatan ini, seluruh pegangan lama perlu dilepaskan, tidak terikat lagi pada nilai-nilai yang lain, dan sepenuhnya mengarahkan pandangan pada kehendak untuk berkuasa.<sup>11</sup>

Catatan yang hendak kami garis bawahi dari konsep kehendak untuk berkuasa yang Nietzsche sampaikan ialah adanya kecenderungan pribadi yang dibawa masuk dalam kepentingan kuasa. Tentu saja pokok ini juga berlaku dalam konteks politik kepemimpinan. Itulah sebabnya ada banyak asumsi yang mengatakan bahwa dalam politik itu selalu sarat muatan kepentingan, baik itu kepentingan pribadi maupun

<sup>7</sup> Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik* (Penerbit Ledalero, 2010), 139.

<sup>8</sup> Yosef Keladu Koten, *Partisipasi Politik* (Ledalero, 2010), 140.

<sup>9</sup> Joas Adiprasetya, "Nabi Dan Sahabat: Teologi Publik Sebagai Keterlibatan Simbolis," *BIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 5, no. 2 (2022): 296-97.

<sup>10</sup> Koten, *Partisipasi Politik* (Penerbit Ledalero, 2010), 140-41.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika* (Kanisius, 1997), 198-99.

kelompok yang pada hakikatnya merugikan masyarakat umum. Para pemimpin bisa secara vulgar mempertontonkan sengketa kepentingan untuk menjadi tontonan publik. Dengan berkaca dari fakta ini sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pokok pendahuluan maka kita kemudian mengharapkan agar konsep demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat itu semestinya menjadi titik pijak para pemimpin mengoptimalkan kerja kemanusiaan.

### **Ajaran Paus Fransiskus tentang Politik Kepemimpinan**

Paus Fransiskus, sebagaimana yang dikutip Johannis Ohoitimir dari Ensiklik *Fratelli Tutti* menolak yang namanya kepemimpinan tangan besi yang terlihat melalui sikap sewenang-wenang terhadap orang lain yang ia pimpin. Sebaliknya, belajar dari teladan Yesus, seorang pemimpin, baik di ranah gereja maupun pemerintah, diharapkan dapat melayani dengan sukarela, tanpa diikuti oleh kepentingan yang lain, seperti kepentingan pribadi dan kelompok. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melayani semua orang tanpa berupaya menjaga kuasa. Adalah suatu ironi apabila kepentingan pribadi diutamakan, dan orang banyak malah menderita. Bagi Paus Fransiskus, usaha menjaga nama dan kuasa adalah bentuk pemujaan diri sendiri dan mengedepankan kepentingan dunia.<sup>12</sup>

Sedangkan politik sesungguhnya adalah cara mencapai kemaslahatan bersama. Untuk itu, seluruh perangkat politik, termasuk para pemimpin di barisan pemerintahan harus dapat menciptakan stabilitas dalam hidup bersama. Ini juga yang menjadi ajaran Paus Fransiskus dalam Ensiklik *Fratelli Tutti*. Hanya saja, dalam perkembangan yang ada, makna positif politik kini dalam dunia abad 21 mengalami pergeseran makna dikarenakan adanya tindakan tak terpuji yang dilakukan oleh para pemimpin. Tindakan tidak terpuji itu seperti adanya korupsi yang masif, adanya ideologi lain yang disusupi masuk yang dapat merusak iklim demokrasi yang telah terbangun.<sup>13</sup>

Mirisnya, ideologi yang diusung itu kerap kali berpihak pada kepentingan pribadi. Paus Fransiskus dengan cermat membaca fenomena ini dengan penjelasan bahwa kerap kali para pemimpin mampu menarik perhatian masyarakat. Mereka adalah para pemimpin populer. Mereka itu pada awalnya terkesan begitu merakyat, mampu membaca kebutuhan masyarakat, menerjemahkan kebutuhan itu melalui ruang kebebasan bagi masyarakat mengeksplorasi seluruh kemampuan diri. Hanya saja perlu diwanti-wanti cara seperti ini lantaran para pemimpin populer yang tampil baik di depan publik bisa berubah menjadi pemimpin yang otoriter serentak egosentrisk karena ingin mendapatkan kepentingan lain yang bisa mencelakai stabilitas hidup bersama.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Johannis Ohoitimir, "Spiritualitas Kegembalaan Dan Kepemimpinan Dalam Gereja," *Pineleng Theological Review* 1, no. 2 (2024): 112.

<sup>13</sup> Martin Harun (Penerjemah), *FRATELLI TUTTI: Saudara Sekalian* (Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020), 109.

<sup>14</sup> Harun (Penerjemah), *FRATELLI TUTTI: Saudara Sekalian*, 98.

Paus Fransiskus kemudian memberikan suatu cara pandang baru bagi para pemimpin dalam meminimalisir keserakahan yang bisa saja mereka lakukan ketika menikmati kursi empuk nan memikat sebagaimana yang termuat dalam instruksinya berjudul *"Pelayanan Kepemimpinan dan Ketaatan"*. Caranya yakni pemimpin harus terus mencari dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah melalui panggilan hidup baktinya sebagai seorang pemimpin publik. Tapi, yang menarik dalam tawaran ini yakni Paus Fransiskus tidak melupakan relasi horizontal, sebagai konteks nyata para pemimpin ada dan melayani. Paus Fransiskus juga menunjukkan kesulitan dalam menjaga relasi horizontal yakni kerap kali seorang pemimpin bisa merasa pesimis karena tidak mampu mengkoordinir masyarakat atau juga bisa terjebak dalam bahaya kompetitif antar sesama pemimpin.<sup>15</sup>

Paus Fransiskus juga dalam instruksi yang ia keluarkan tentang Pelayanan Kepemimpinan dan Ketaatan menegaskan bahwa masalah di seputaran kepemimpinan dan politik sering kali terjebak dalam isu kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi seringkali berbenturan dengan tujuan memanusiakan manusia dalam panggilan menjadi pemimpin. Hal ini pada akhirnya juga melemahkan karisma diri sang pemimpin dalam membaktikan hidupnya dalam pelayanan untuk kemajuan bersama.<sup>16</sup>

Dengan merujuk pada apa yang menjadi gagasan Paus Fransiskus, perihal kepemimpinan dan politik, maka kami kemudian berpendapat bahwa politik dalam arti negatif memang akan selalu mencari kekuasaan. Jika telah berbicara tentang kekuasaan maka bahaya persaingan tidak bisa dihindari. Ada yang menyebut diri sebagai perwakilan rakyat tetapi terjebak dalam hegemoni kekuasaan. Ada yang datang memikat hati rakyat dengan banyak janji tapi lekas lupa pada janji ketika terpilih. Ada pemimpin yang memang punya tujuan memelintir kepentingan umum untuk kepuasan pribadi dan elite.

Kami lalu berkesimpulan bahwa politik dan kepemimpinan merupakan dua hal yang saling beririsan. Melalui kepemimpinan, masyarakat diarahkan untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri yakni upaya menciptakan kehidupan kota yang adil dan makmur. Kendati begitu, kami akan terlebih dahulu memperlihatkan makna kepemimpinan dan bagaimana korelasinya dengan politik.

Kepemimpinan secara umum dipahami sebagai suatu cara untuk mempengaruhi orang lain. Proses mempengaruhi itulah yang disebut dengan teladan. Maka, bisa juga kita katakan bahwa keteladanan yang baik dari seorang pemimpin juga bisa menjadi indikator penentu tercapainya iklim kehidupan komunitas yang setara dan adil. Idealnya untuk bisa tiba pada hal ini maka seorang pemimpin diharapkan bisa memiliki

---

<sup>15</sup>R.P. Andreas Suparman & Bernadeta Harini Tri Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)* (Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020), 24–25.

<sup>16</sup> Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*, 10.

keyakinan, kecakapan dan menerima yang lain tanpa membangun sekat. Pemimpin yang baik juga tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi.<sup>17</sup>

### **Apa yang Harus Dilakukan Agar Pemimpin Tidak Terjebak dalam Kepentingan Politik?**

Pemimpin selalu melekat dengan kuasa. Kekuasaan yang ada di tangannya itu berpengaruh terhadap seluruh pengambilan kebijakan. Karena faktor ini, kerap dijumpai adanya pemimpin yang bersikap otoriter terhadap jabatan yang ia pegang. Ia mau meraup untung dari jabatannya. Kepentingan masyarakat luas kemudian diabaikan. Dalam pola seperti ini maka model kepemimpinan penting diperlihatkan demi masyarakat mengetahui perjalanan atau kiprah pemimpin dan bahkan bisa segera berwaspada jika nantinya pemimpin kita jatuh dalam tirani.

Sobry Sutikno menjabarkan ada 7 tipe pemimpin. Ketujuh tipe ini berpengaruh besar pada iklim politik suatu wilayah. Tipe pertama yakni tipe otokritik. Dalam tipe ini, seorang pemimpin menganggap bahwa kekuasaan itu haknya secara mutlak dan ia punya kewenangan memutuskan kebijakan tanpa berkoordinasi dengan yang lain. Tipe kedua ialah cenderung masa bodoh. Tipe ini menempatkan pemimpin sebagai seorang yang kerap kali lari dari tanggungjawab. Tipe ketiga, paternalistik. Tipe ini tidak saja membuat para bawahan bergantung pada pemimpinnya tetapi juga pada diri sang pemimpin mengharapkan agar keputusannya menjadi legitimasi atas perannya yang begitu dominan.<sup>18</sup>

Tipe keempat ialah berkharisma. Tipe pemimpin ini punya daya tarik tersendiri yang mampu memikat para pengikutnya. Tipe kelima, militeristik. Tipe ini memperlihatkan kesombongan seorang pemimpin karena jabatannya. Tipe keenam ialah pseudo-demokratik. Tipe pemimpin ini cenderung menggunakan topeng. Tampaknya ia bersikap demokratis tetapi sesungguhnya ia otokratis. Tipe ketujuh, demokratis. Tipe pemimpin ini disenangi karena suka mendengar tiap saran serta aktif di dalam memajukan kesejahteraan.<sup>19</sup>

Tipe kepemimpinan demokratis ini bisa menjadi indikator bagi masyarakat dalam menilai kepemimpinan suatu rezim. Kami berpendapat bahwa kepemimpinan demokratis merupakan tipe kepemimpinan yang ideal, dimana pemimpin melibatkan semua unsur yang ada dalam masyarakat untuk bekerja bersama memajukan kesejahteraan bersama. Di samping itu, masyarakat perlu juga perlu mengawal agar pemimpin tidak bertindak sesuka hati. Ini juga yang diperlihatkan oleh Paus Fransiskus ketika memperingatkan tentang pemimpin populer yang mampu memikat hati

---

<sup>17</sup> Yuda D. Hawu Haba, "Kepemimpinan Dalam GMIT," in *Eritika A. Nulik (Penyunting) Dalam Kepemimpinan Gereja Di Era Digital* (Pustaka Aksara, 2024), 101–3.

<sup>18</sup> M. Sobry Sutikno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan : Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan* (Penerbit Holistica, 2018), 25–28.

<sup>19</sup> Sutikno, *Pemimpin Dan Kepemimpinan : Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan*, 28–33.

masyarakat di awal kepemimpinan tetapi kemudian dalam perjalannya malah tampil beringas.<sup>20</sup> Kepentingan bersama dikhianati oleh pemimpin dengan bersembunyi dalam spirit populisme. Jadi, bagi kami, tipe kepemimpinan demokratis itu didukung oleh Paus Fransiskus, tetapi juga dibarengi dengan sebuah seruan untuk pemimpin yang dipilih dari iklim demokrasi yang baik, jangan sekali-kali merusak citra yang baik itu.

Dalam ensiklik *Fratelli Tutti*, Paus Fransiskus secara gamblang memaparkan tentang populisme. Baginya, populisme dalam dunia kita telah disalah-artikan. Akibat terburuk dari salah kaprah ini ialah para pemimpin terkesan menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk peduli pada rakyat tetapi sebenarnya ada niat lain yang disembunyikan. Masyarakat hidup dalam polaritas yang terpecah-belah. Populisme pada gilirannya dapat menghapus makna demokrasi, yakni pemerintahan oleh rakyat. Paus Fransiskus melihat bahwa dalam kasus semacam ini, kehadiran masyarakat menjadi penting di dalam menyelamatkan demokrasi.<sup>21</sup>

Dalam hemat kami, populisme banyak dibahas oleh Paus Fransiskus oleh karena ada perubahan paradigma dari makna demokrasi, sebagaimana yang tercantum dalam *Ensiklik Fratelli Tutti* pada bahasan di atas. Para pemimpin, sebelum terpilih, berupaya memobilisasi masa untuk mencapai suara minimum dalam mengamankan kursi kekuasaan. Namun, setelah terpilih, tugasnya untuk melayani masyarakat malah diabaikan. Pemimpin bertindak sebagai tuan. Kebutuhan rakyat diabaikan. Disini upaya memobilisasi masa dengan janji politik hanyalah tindakan manipulasi. Demokrasi tidak lagi berjalan sesuai hakikatnya yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Agar penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari, maka hal apa yang harus dilakukan? Kami tertarik dengan suatu catatan dari A. Setyo Wibowo tentang keniscayaan mendidik pemimpin. Tugas ini bukan tugas gampang tetapi juga tidak ada di sekolah-sekolah formal. Malah, baginya, pemimpin itu dalam arti yang sesungguhnya ialah mereka yang punya visi-misi, serta bersedia membenamkan dirinya dalam visi yang sudah ia tetapkan. Pemimpin melebihi pengertian pengelolaan.<sup>22</sup>

Tapi, Wibowo memperlihatkan titik paradoks dari mendidik pemimpin. Di titik pertama harus diakui bahwa kepemimpinan tidak bisa diprogramkan karena berkaitan erat dengan bakat, anugerah yang telah diberikan oleh alam dan Allah. Tetapi di titik kedua pendidikan kepemimpinan bisa diprogramkan ketika dalam arti tertentu pendidikan itu melalui proses seleksi. Dalam proses ini, orang-orang yang berbakat diseleksi, dikumpulkan dan dididik dengan kurikulum kepemimpinan. Dari proses yang ketat itu, jiwa kepemimpinan dirangsang dan sekaligus mendidik hati yang penuh cinta melayani publik.<sup>23</sup> Kata lainnya, proses ini membantu seorang pemimpin untuk tidak disebut sebagai pemimpin karbitan atau asal jadi.

---

<sup>20</sup> Harun (Penerjemah), *FRATELLI TUTTI* : Saudara Sekalian, 99

<sup>21</sup> Harun (Penerjemah), *FRATELLI TUTTI* : Saudara Sekalian, 96–97.

<sup>22</sup>A. Setyo Wibowo, *Mendidik Pemimpin & Negarawan* (Penerbit Lamalera, 2014), 5.

<sup>23</sup> Wibowo, *Mendidik Pemimpin & Negarawan*, 21.

Pemimpin yang telah melewati serangkaian proses yang pada akhirnya mampu memberi diri melayani. Gagasan Wibowo ini juga tegak lurus dengan penegasan Paus Fransiskus. Pemimpin yang telah didik hati nuraninya akan sadar bahwa apa yang telah ia raih bukan menjadi alat menyombongkan diri, sebaliknya, karena sadar bahwa dirinya adalah pelayan publik dan apa yang ia dapat semata-mata adalah pemberian Tuhan, maka itu merangsang yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai pemimpin untuk mengabdi sebaik-baiknya.<sup>24</sup>

Pengabdian itu ada di jalan misi. Misi yang dimaksud itu adalah melalui kapasitas tugas sang pemimpin, ia pada akhirnya bisa menjadi alat perpanjangan tangan dan kasih Allah yang di dalamnya dipenuhi semangat untuk merangkul, yang juga di dalamnya kehadiran pemimpin bisa menarik semua yang dipimpinnya berjalan masuk ke dalam kasih dan kebaikan.<sup>25</sup> Mencermati pandangan dari Wibowo dan Paus Fransiskus ini maka kami berdalih bahwa mendidik seorang pemimpin bisa menempatkan rakyat sebagai pengawas. Rakyat akan menilai kinerja pemimpin. Jabatan itu bukan menjadi alat mencapai kepentingan diri tetapi sebagai akses mengoptimalkan potensi diri yang integratif mulai dari pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan konkret.

Rakyat bisa memberikan apresiasi atas kinerja pemimpinnya tetapi juga serentak rakyat bisa menegur apabila fungsi jabatannya tidak digunakan secara baik. Fenomena ini juga yang bisa kita jumpai dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Rakyat tidak segan-segan menyampaikan kritiknya atas rezim yang berkuasa ketika telah salah memanfaatkan jabatan itu.

Coba lihat misalnya kasus Baleg DPR yang begitu cepat membatalkan keputusannya menolak putusan MK tentang pemilihan kepala daerah. Itu artinya bahwa fungsi kontrol demokrasi di Indonesia yang rakyat jalankan masih punya pengaruh menghentikan mata rantai tirani. Inilah yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi itu bermakna keikutsertaan masyarakat di dalam mengawasi-mengontrol jalannya suatu roda pemerintahan.<sup>26</sup> Sejalan dengan prinsip ini maka perlu ada yang namanya sikap keterbukaan dari pemerintah akan seluruh regulasi keputusan sebagai bagian penting dari melaksanakan amanat demokrasi.

### **Menjembatani Ajaran Paus Fransiskus tentang Pemimpin dan Politik dalam Konteks Indonesia**

Salah satu sisi lain dari praktik politik kepemimpinan di Indonesia yang sering disorot yakni politik dinasti. Isu ini makin mendapatkan tanggapan masyarakat secara masif pada pemilihan umum 2024, lalu. Berbagai produk hukum tentang pemilihan kemudian

---

<sup>24</sup> Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*, 53–54.

<sup>25</sup> Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*, 59.

<sup>26</sup> Mawardi Khairi, "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum," *Selisik* 3, no. 5 (2017): 87 & 92.

direvisi untuk memuluskan jalan anggota keluarga bisa maju dalam kontestasi pemilihan. Salah satu aturan yang diubah itu ialah pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sesungguhnya turunan dari UU No. 7, tahun 2017, pasal 169, poin (q) yang menegaskan bahwa untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun, yang sebelumnya menegaskan bahwa calon presiden dan wakil presiden minimal berusia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.<sup>27</sup>

Aturan ini kemudian dibaca sebagai upaya memuluskan kepentingan keluarga untuk maju menjadi bakal calon pemimpin. Hal ini yang di kemudian hari mendapatkan kritik karena dianggap sebagai kepentingan dinasti politik. Politik model ini yang selanjutnya bisa dimaknai sebagai benturan kepentingan. Sebab, dalam hemat kami, politik dinasti sering kali menutup ruang bagi kader yang lain untuk bisa maju dalam kontestasi yang sama. Padahal demokrasi itu memungkinkan ruang bagi semua elemen untuk mendapatkan akses yang sama. Catatan ini merupakan satu dari sekian banyak kecacatan demokrasi di Indonesia.

Dengan mencermati masalah di atas, maka kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus yakni masalah dari kepemimpinan itu sering dijegal oleh praktik kepentingan. Ketakutan terbesar dari praktik kepentingan itu ada pada pemimpin yang punya potensi untuk bersikap korup dan kerap juga menggunakan prinsip tangan besi dengan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Pada prinsipnya, korupsi adalah tindakan para pejabat memperkaya dirinya sendiri. Tidak hanya itu, korupsi kerap menjadi tindakan balas jasa terhadap para pihak yang mendukung seorang pemimpin hingga terpilih. Model kepemimpinan yang koruptif seperti ini secara langsung memengaruhi hakikat dari kepemimpinan itu sendiri yakni tindakan memengaruhi orang lain.<sup>28</sup> Melalui kepemimpinan model ini dengan sendirinya ia mencederai prinsip politik, yang pada hakikatnya semua pihak berjejaring untuk memajukan kesejahteraan suatu wilayah.

Terhadap realitas ini maka apa yang menjadi ajaran Paus Fransiskus penting untuk diperhatikan. Benar bahwa Paus Fransiskus memang adalah seorang pemimpin umat agama Katolik. Meski begitu, Paus Fransiskus juga punya kontribusi besar terhadap perkembangan dialog antar agama. Kami perlu mengkonfirmasi bahwa kami berasal dari kalangan Protestan, tetapi karena perhatian ekumenis Paus Fransiskus yang penuh dedikasi itu, maka bagi kami ini menjadi jembatan atau penghubung untuk bisa mengaktualisasikan nilai-nilai ajarannya dalam konteks ke-Indonesiaan.

---

<sup>27</sup> Gunas Sainerius & Kristianus Garman, "Praktik Politisasi Hukum Pada Pemilu 2024 dan Dampaknya Bagi Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025): 76.

<sup>28</sup> M. Fajar Hidayanto, "Kepemimpinan Dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)," *Al Mawarid* Edisi XIII (2005): 38.

Karena itu, ajaran soal politik dan kepemimpinan Paus Fransiskus juga mendapatkan dasar yang kuat dalam konteks politik Indonesia. Politik bagi Paus Fransiskus sebagaimana yang dikutip oleh Yohanes Prasetyo harusnya menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh karena itu, politik yang baik semestinya mampu membebaskan pemimpin dari kepentingan elite-ekonomi. Poin ini penting sebab jika politik hanya dipandang sebagai jalan meraup untung maka seluruh problem kemanusiaan, seperti mengentaskan kemiskinan serta perlindungan hak asasi manusia tidak berjalan. Demokrasi dipasang oleh kepentingan.<sup>29</sup>

Pandangan Paus Fransiskus ini memang sejalan dengan hakikat *polis*. *Polis* ada sebagai wadah dimana individu-individu berkumpul dan serentak mengembangkan potensi diri. Penjelasan Paus Fransiskus ini juga khas Injil yang menjadi seruan pembebasan atas kekuasaan yang lalim. Pemimpin itu hendaknya membaktikan diri secara total bagi kesejahteraan umat manusia dalam hal ini wilayah yang ia pimpin. Masalahnya di sini, pemimpin kita masih berdebat di level elite, mencari keuntungan kelompok, mengaderisasikan keluarga untuk melanjutkan estafet kepemimpinan, memasung demokrasi atas nama kepentingan keluarga dan banyak kompleksitas masalah politik di Indonesia. Pada akhirnya rakyat yang dikorbankan.

Lalu, apa kriteria utama seorang pemimpin dalam konteks Indonesia? Pemimpin yang baik dalam hemat Paus Fransiskus yakni harus menjunjung konsep melayani. Pemimpin adalah pelayan. Dalam semangat melayani ini, seorang pemimpin menaruh rasa hormat kepada Tuhannya. Sikap rendah hati itu selalu mengarahkan seorang pemimpin untuk melaksanakan tugasnya selaras dengan kehendak Allah dalam pelayanannya.<sup>30</sup>

Lebih lanjut, dalam instruksi Pelayanan Kepemimpinan dan Ketaatan, Paus Fransiskus bahwa "Seorang pemimpin dipanggil untuk meningkatkan martabat pribadi, dengan memperhatikan setiap anggota komunitasnya serta perjalanan pertumbuhan mereka, dengan memberikan kepada masing-masing, penghargaan yang tepat serta pertimbangan-pertimbangan yang positif, dengan memelihara afeksi yang tulus kepada semua, serta menjaga kerahasiaan yang diterima."<sup>31</sup> Paus Fransiskus memang selalu serius perihal sikap keberpihakan pada kaum lemah. Perhatian ini menempatkan pemimpin dalam spirit melayani dengan penuh kesungguhan. Jika ternyata pemimpin salah mengoptimalkan panggilan ini, ia hanya meninggalkan preseden buruk bagi generasi berikutnya dan malah menurunkan martabatnya.

---

<sup>29</sup>Yohanes Wahyu Prasetyo, "Politik Yang Baik Menurut Paus Fransiskus Dalam *Fratelli Tutti*," in *Dalam Yohanes W. Prasetyo, Mengurai Pokok-Pokok Pikiran Paus Fransiskus* (Penerbit JPIC OFM Indonesia, 2024), 223.

<sup>30</sup> Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*, 26.

<sup>31</sup> Prasasti, *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*, 28.

Politik keberpihakan pada kaum lemah ini dalam kajian Anthonius Panji Satrio & R.F. Bhanu Viktorahadi dikenal sebagai politik kemanusiaan dan politik kasih. Politik kemanusiaan dimaksudkan untuk memutuskan mata rantai kekerasan dan selanjutnya memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Politik kemanusiaan ini yang menolong pemimpin memiliki konsentrasi penuh terhadap pemenuhan kepentingan umum. Dalam rangka ini maka seorang pemimpin harusnya mengubah keterlibatan politisnya yang sarat kepentingan menuju kepada penghormatan akan martabat manusia.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, Satrio & Viktorahadi menjabarkan tiga kriteria politik kemanusiaan sebagaimana yang digagas oleh Paus Fransiskus. Pertama, politik yang dijalankan harus didasarkan pada solidaritas politik. Solidaritas politik dimaksudkan untuk menumbuhkan belas kasih sosial. Kedua, politik harus selalu mengendapkan kasih politik. Kasih politik ada supaya merangsang kepekaan para pemimpin untuk memberi makan dan menyediakan akses lapangan pekerjaan kepada masyarakat umum. Ketiga, politik harus memberi buah atau hasil. Hasil itu adalah hasil kebaikan yang menembus sekat/tembok kepentingan pribadi untuk selanjutnya bergeber kepada kepedulian pada sesama.<sup>33</sup>

Model kepemimpinan yang diserukan oleh Paus Fransiskus ini akan menjadi sebuah kritik yang cukup serius dalam konteks demokrasi Indonesia yang kerap kali mengabaikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Kepemimpinan yang korup, melanggengkan kekuasaan keluarga, serta juga mementingkan kepentingan kelompok dan keluarga menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi oleh sistem berdemokrasi negara kita. Jika hal-hal ini bisa dibenahi, maka politik kasih dan politik kemanusiaan atau juga relasi persahabatan di ruang publik bisa diaktualisasikan.

### **Catatan Evaluasi dan Harapan atas Politik Kepemimpinan di Indonesia**

Poin ini sesungguhnya merupakan suatu catatan evaluasi dan harapan dari kami. Bisa dibilang bahwa catatan ini merupakan hasil pengamatan dan kegelisahan terhadap konstelasi politik Indonesia.

Pertama, demokrasi Indonesia ada dalam titik suam-suam kuku. Kelihatan dari luar berjalan baik-baik saja tetapi jika ditelisik ternyata ada banyak gejolak yang ada. Gejolak ini memuncak pada perhelatan pemilu dan pilkada yang sudah mulai berjalan sejak 2023. Puncaknya ada di tahun 2024. Ada indikasi di kalangan para pemimpin Indonesia untuk merawat nama dan regenerasi kepemimpinan. Model politik ini mencederai demokrasi kita. Demokrasi hanya dijadikan alat untuk memikat hati rakyat tapi kemudian dikhianati.

---

<sup>32</sup>Anthonius Panji Satrio & R.F. Bhanu Viktorahadi, "Politik Kemanusiaan Dalam Ensiklik Fratelli Tutti," *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 148-50.

<sup>33</sup>Viktorahadi, "Politik Kemanusiaan Dalam Ensiklik Fratelli Tutti," 150-51.

Kedua, teguran Paus Fransiskus tentang pemimpin populer tampaknya juga dihidupi dalam konteks politik Indonesia. Pemimpin populer ini bersembunyi dalam topeng pencitraan. Mereka banyak mengiklankan diri, menjual program, tapi pada akhirnya terjebak dalam tirani. Masyarakat bisa pula menjadi kecewa tetapi daya kritis masyarakat Indonesia patut diapresiasi lantaran gejolak politik kepentingan bisa dilawan. Para pemimpin kita, yang juga adalah representasi masyarakat di gedung DPR juga terjebak dalam kepentingan kelompok. Kalau sudah demikian kejadiannya maka siapa yang harus diperhatikan dan ditolong?

Ketiga, dalam menjawab pertanyaan pada poin dua maka harapan kami ialah politik kasih dan politik kemanusiaan yang Paus Fransiskus suarakan perlu dihidupkan oleh para pemimpin Indonesia. Indonesia masih berperang dengan banyak isu kemanusiaan, seperti pengusutan masalah HAM berat yang belum menemukan titik temu, kemiskinan yang menjadi pemicu perdagangan orang, politik identitas yang walaupun secara musiman timbul tapi berdampak pada stabilitas kehidupan sosial. Politik kasih dan politik kemanusiaan menjadi tawaran baik untuk dilakukan. Lewat politik kasih dan politik kemanusiaan, integritas diri pemimpin diuji. Para pemimpin harus menunjukkan pada publik bahwa mereka mampu mewujudkan kepekaan sosial dan tidak terjebak dalam kepentingan primordial.

#### 4. Kesimpulan

Pemimpin sesungguhnya adalah pelayan publik. Tesis ini menarik karena secara sendirinya menangkal tuduhan bahwa pemimpin adalah bos. Masyarakat hanyalah budak dan siap sedia melaksanakan instruksi pemimpinnya. Pemimpin adalah representasi masyarakat dengan tugas khusus yang sebenarnya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. *Polis* itu kumpulan manusia, tidak bisa dipisahkan. Itu berarti bahwa perlu ada kerja kolaboratif untuk kepentingan bersama. Akan menjadi miris jika kemudian kepentingan bersama itu dipelintir oleh kepentingan pribadi. Seruan politik kasih dan politik kemanusiaan hendaknya menjadi dasar pijak dari para pemimpin di dalam menjalankan fungsinya. Dua macam politik yang Paus Fransiskus tawarkan memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Melalui tulisan ini juga kami mengharapkan adanya penelitian lanjutan untuk melengkapi publikasi ini sebagai bagian dari membumikan gagasan Paus Fransiskus dan menggaungkan politik yang berlandaskan nilai kasih dan kemanusiaan di bumi Indonesia.

#### Referensi

- Adiprasetya, Joas. "Nabi Dan Sahabat: Teologi Publik Sebagai Keterlibatan Simbolis." *BIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 5, no. 2 (2022): 296–97. <https://doi.org/10.34307/b.v5i2.413>.

- Gunas, Sainerius & Kristianus Garman. "Praktik Politisasi Hukum Pada Pemilu 2024 Dan Dampaknya Bagi Demokrasi Di Era Kepemimpinan Jokowi." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025): 76.
- Hantoro, Juli. *DPR Tolak Putusan MK Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah*. Oktober 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1906618/dpr-tolak-putusan-mk-tentang-syarat-usia-calon-kepala-daerah>.
- Harun (Penerjemah), Martin. *FRATELLI TUTTI: Saudara Sekalian*. Departemen Dokumentasi Dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020.
- Hawu Haba, Yuda D. "Kepemimpinan Dalam GMIT." In *Eritrika A. Nulik (Penyunting) Dalam Kepemimpinan Gereja Di Era Digital*. Pustaka Aksara, 2024.
- Hidayanto, M. Fajar. "Kepemimpinan Dan Korupsi (Simbiosis Mutualisme)." *Al Mawarid* Edisi XIII (2005): 38.
- Khairi, Mawardi. "Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Penegakan Hukum Peraturan Daerah Perspektif Teori Negara Hukum." *Selisik* 3, no. 5 (2017): 87 & 92. <https://doi.org/10.35814/selisik.v3i1.658>.
- Kirmala, dkk, Saqinah Aifi. "Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023." *Journal of Law and Nation (JOLN)* 3, no. 3 (2024): 493. <https://doi.org/10.35316/john.v1i2.135>.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Penerbit Ledalero, 2010.
- Koten, Yosef Keladu. *Partisipasi Politik*. Ledalero, 2010.
- Magdalena, dkk. *Metode Penelitian*. Penerbit Buku Literasiologi, 2021.
- Ohoitimir, Johanis. "Spiritualitas Kegembalaan Dan Kepemimpinan Dalam Gereja." *Pineleng Theological Review* 1, no. 2 (2024): 112. <https://doi.org/10.53396/pthrv1i2.407>.
- Prasasti, R.P. Andreas Suparman & Bernadeta Harini Tri. *Pelayanan Kepemimpinan Dan Ketaatan (El Servicio De La Autoridad Y La Obediencia)*. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2020.
- Prasetyo, Yohanes Wahyu. "Politik Yang Baik Menurut Paus Fransiskus Dalam Fratelli Tutti." In *Dalam Yohanes W. Prasetyo, Mengurai Pokok-Pokok Pikiran Paus Fransiskus*. Penerbit JPIC OFM Indonesia, 2024.
- Satrio, Anthonius Panji & R.F. Bhanu Viktorahadi. "Politik Kemanusiaan Dalam Ensiklik Fratelli Tutti." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 148–50. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v6i2.14072>.
- Suseno, Franz Magnis. *13 Tokoh Etika*. Kanisius, 1997.
- Sutikno, M. Sobry. *Pemimpin Dan Kepemimpinan : Tips Praktis Untuk Menjadi Pemimpin Yang Diidolakan*. Penerbit Holistica, 2018.
- Takwin, Bagus. *Etika Politik: Menimbang Ulang Politik*. TINTA Creative Production, 2011.

- Taneo, Rolin F. S. *Politik Identitas Di Indonesia Dan Wacana Perdamaian*. No. 09-10, Tahun ke-73. Majalah Basis, 2024.
- Viktorahadi, Anthonius Panji Satrio & R.F. Bhanu. "Politik Kemanusiaan Dalam Ensiklik Fratelli Tutti." *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 6, no. 2 (2021): 148-50.
- Wibowo, A. Setyo. *Mendidik Pemimpin & Negarawan*. Penerbit Lamalera, 2014.
- Wibowo, dkk, Ghiyats A. "Pembatasan Oligarki Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 5, no. 3 (2024): 234. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i3.102>.